



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.501, 2020

KEMENKEU. Tarif Nol Rupiah. Layanan Biaya Beban. Paspor. Hilang. Rusak. Keadaan Kahar. Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/PMK.02/2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang atau Rusak karena Keadaan Kahar(*force majeure*) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Jasa Pelayanan Keimigrasian berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Lainnya meliputi Biaya Beban Paspor Hilang dan Biaya Beban Paspor Rusak.

### Pasal 2

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), tariff atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Biaya Beban Paspor Hilang dan Biaya Beban Paspor Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan Rp 0,00 (nol Rupiah).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. banjir;
  - b. gempabumi;
  - c. kebakaran;
  - d. huruhara; dan
  - e. bencanaalamlainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

### Pasal 3

Warga Negara Indonesia yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan tariff Rp 0,00 (nol Rupiah) berdasarkan permohonan dari wajib bayar.

### Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada:
  - a. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bagi yang berada di wilayah Republik Indonesia; atau
  - b. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri bagi yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. nama;
  - b. tempat/tanggal lahir;
  - c. alamat domisili;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alasan permohonan.

- (3) Selain permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bayar juga harus melampirkan surat keterangan dari kelurahan/otoritas yang berwenang sesuai domisili yang bersangkutan, sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa wajib bayar tersebut mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang paspor dan surat perjalanan laksana paspor.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan persetujuan pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) kepada wajib bayar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, wajib bayar membayar Biaya Beban Paspor Hilang atau Biaya Beban Paspor Rusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 6

Format persetujuan atau penolakan pengenaan tariff Rp 0,00 (nol Rupiah) untuk Biaya Beban Paspor Hilang atau Biaya Beban Paspor Rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 51/PMK.02/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN BIAYA  
 BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KARENA KEADAAN  
 KAHAR/*FORCE MAJEURE* YANG BERLAKU PADA  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGENAAN TARIF Rp0,00 BIAYA  
 BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR (*FORCE  
 MAJEURE*)

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI/PERWAKILAN RI	
Nomor	: Tanggal, bulan, tahun
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:
Kepada, Yth. Wajib Bayar	
<p>Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) dalam layanan biaya beban paspor hilang atau rusak karena keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>), dengan data sebagai berikut:</p>	
a.	Nama :
b.	Tempat/tanggal lahir :
c.	Alamat :
d.	Pekerjaan :
<p>Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana disebut di atas.</p>	
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Kepala Kantor Imigrasi/Perwakilan RI (ttd)	
Tembusan:	
1.	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI